



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 143 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagai pedoman dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lainnya Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi reformasi birokrasi di kabupaten Bantul baik general maupun tematik.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai ruang lingkup:
1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General; dan
 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- KELIMA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan karena :
- a. terjadi perubahan roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul;
 - b. adanya perubahan tema atau fokus pelaksanaan Reformasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Bantul; dan/atau
 - c. hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi roadmap Reformasi Birokrasi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 371 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

I. Reformasi Birokrasi General

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan. RB General berfokus pada pelaksanaan kegiatan utama yang menjadi mandatory, kegiatan utama tersebut antara lain:

Tabel 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

NO	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana	
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	TOTAL			Renaksi Pelaksana	PD Pelaksana
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel															
	S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi														
1.	Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka transformasi jabatan tindak lanjut Permenpan 45 Tahun 2022/Kepmenpan 11 Tahun 2024	Dokumen Anjab dan ABK	Dokumen	-	-	-	1	1	2.500.000	Setda (Bagian Organisasi)	Menyusun identifikasi Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	Seluruh PD
														Mengumpulkan Data Jabatan	
														Pengolahan Data Jabatan	
														Verifikasi Jabatan dan Validasi Jabatan	
				Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Nilai dan Kelas Jabatan penyesuaian nomenkelatur pasca Penyederhanaan Birokrasi	Raperbup Nilai dan Kelas Jabatan	Dokumen	-	-	-	1	1	2.500.000	Setda (Bagian Organisasi)	Melaksanakan Identifikasi Informasi Faktor Jabatan berdasarkan Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011	Seluruh PD
S.2 Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik															
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	100%	Menyusun Laporan Monitoring Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada	Laporan Monitoring Impelementasi Pelaksanaan Mekanisme Kerja	Laporan	1	-	-	-	1	2.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	Melaksanakan Monitoring Impelementasi Pelaksanaan Mekanisme Kerja pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

				Pemerintah Kabupaten Bantul											
				Menyusun Dokumen Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bantul	Dokumen Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Mekanisme Kerja	Dokumen	-	-	-	1	1	2.000.000	Setda (Bagian Organisasi)	1.Menyusun laporan implementasi pelaksanaan mekanisme kerja 2.Pengumpulan Data Kuesioner implementasi pelaksanaan mekanisme kerja	Seluruh PD
S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional															
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implemetasi Kebijakan penyusunan arsituktur SPBE	Baik	Melakukan Reviu dan Update Arsitektur SPBE Kabupaten Bantul	Dokumen Arsitektur SPBE	Dokumen	-	-	-	1	1	3.000.000	Dinas Kominfo	Menyediakan data penyusunan arsitektur SPBE pada 6 domain: domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, dan domain keamanan SPBE	Seluruh PD
				Melakukan Reviu dan Update Peta Rencana SPBE Kabupaten Bantul	Dokumen Peta Rencana SPBE	Dokumen	-	-	-	1	1	2.000.000	Dinas Kominfo	Menyediakan data penyusunan potofolio inisiatif SPBE dan Roadmap SPBE	Seluruh PD
				Melaksanakan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan SPBE	Laporan Pemantaun dan Evaluasi SPBE	Dokumen	-	-	-	1	1	3.000.000	Dinas Kominfo	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE	Seluruh PD
		Indeks SPBE	3,35	Penyusunan kebijakan internal SPBE	Dokumen Kebijakan Internal SPBE	Dokumen	-	-	-	7	7	227.400.000	Dinas Kominfo	Memfaatkan kebijakan internal SPBE sebagai	Seluruh PD

														pedoman penyelenggaraan layanan e-gorvenment		
				Implementasi arsitektur SPBE	Dokumen arsitektur SPBE	Dokumen	-	-	-	1	1			Dinas Kominfo	Melakukakn update data layanan dan aplikasi SPBE	Seluruh PD
				Implementasi Peta Rencana SPBE	Dokumen peta rencana SPBE	Dokumen	-	-	-	1	1			Dinas Kominfo	Melaporkan update data rencana SPBE	Seluruh PD
				Implementasi Manajemen SPBE	Dokumen manajemen SPBE	Dokumen	-	-	-	8	8			Dinas Kominfo	-	Seluruh PD
				Monitoring, Evaluasi layanan SPBE	Dokumen monitoring, evaluasi layanan pelaporan	Dokumen	-	-	-	16	16			Dinas Kominfo	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	Seluruh PD
S.4																
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indek Prencanaan Pembangunan	Meningkat	Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	Dokumen	-	-	1	1	2	20.000.000	BKPAD	Penyusunan Plafon Anggaran dan RKA	Seluruh PD	
Penyusunan APBD dan Penyusunan APBD Perubahan				Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Dokumen	-	-	1	1	2	15.000.000	BKPAD	Penyusunan DPA	Seluruh PD		
Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD				Dokumen Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	900.000	Bappeda	Penyusunan Dokumen evaluasi Pelaksanaan Renja PD	Seluruh PD		
				Dokumen Evaluasi Hasil RKPD	Dokumen	1	-	1	-	2	8.100.000	Bappeda				
Nilai SAKIP Kabupaten Bantul		A	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati	Dokumen	-	-	2	-	2	702.160.000	Bappeda	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Seluruh PD		
			Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Bimtek pendampingan, desk dan Laporan 1. Bimtek	Kegiatan	2	1	1	2	6	108.909.800	Bappeda	Menyusun/mereviu Renstra, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tata kelola	Seluruh PD		

					Esakip ROPK; 2. Desk pengendalian									perencanaan dan penganggaran yang baik			
														Menyusun Logical Framework Perencanaan, Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan	Seluruh PD		
														Monitoring dan evaluasi kinerja berkala	Seluruh PD		
														Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Seluruh PD		
														Pengukuran dan pelaporan	Seluruh PD		
				Melakukan Pengembangan aplikasi Esakip ROPK sesuai kebutuhan	Penambahan fitur sesuai kebutuhan	Aplikasi				1	1	75.000.000	Bappeda	Memberikan masukan pengembangan	Bagian Organisasi		
				Pendampingan penguatan SAKIP	Perangkat daerah mengikuti peningkatan kapasitas SAKIP	OPD				45	45	10.000.000	Bagian Organisasi	Mengikuti dan menindaklanjuti hasil pendampingan	Semua PD		
						Pelaksanaan Rakor Pengendalian	Terlaksana Evalusi pelaksanaan Program kegiatan	Triwulan	1	1	1	1	4	5.000.000	Bappeda	Melakuakn evaluasi Pembangunan semesteran	TAPD
						Terlaksananya evaluasi kinerja PD dan pemberian reward	Dokumen Raport kinerja Perangkat daerah	Dokumen	45	45	45	45	45	5.000.000	Bappeda	Menyampaikan nilai dan rekomendasi	Tim evaluasi Kinerja PD
						Melakukan evaluasi kebijakan implementasi SAKIP di Pemerintah Kab.	Peraturan Inspektur dan Perbup evaluasi SAKIP	Dokumen				1	1	18.566.610	Inspektorat	-	Inspektorat

				Bantul											
				Melakuakn evaluasi implementasi SAKIP PD	Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP PD	dokumen	45	-	-	-	45	-	Inspektorat	Menindaklanjuti Rekomendasi dalam dokumen hasil evaluasi SAKIP	Seluruh PD
				Melakukan pendampingan SAKIP terhadap OPD yang nilainya masih rendah	Jumlah OPD yang di dampingi	OPD	-	-	5		5	1.000.000	Inspektorat	Menindaklanjuti hasil pendampingan	Seluruh PD
S.5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)															
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Transformasi pelayanan publik digital	84%	Pengelolaan Pusat Data	Laporan Pengelolaan Pusat Data	Unit	1	1	1	1	4	5.034.700.000	Dinas Kominfo	Mengelola pusat data pemerintah daerah	Seluruh PD
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi	Aplikasi	1	1	1	0	3	575.965.203	Dinas Kominfo	Mengembangkan aplikasi dan proses bisnis Pemerintah berbasis elektronik	Seluruh PD
				Menghubungkan Layanan Publik ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Application Programming Interface (API)	Layanan	0	0	0	1	1	0	Dinas Kominfo	Mengintegrasikan layanan publik ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Seluruh PD
				Implementasi Program Inovasi yang sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen Implementasi Program Inovasi	Dokumen	0	0	0	1	1	233.200.000	Dinas Kominfo	Mengimplementasikan program inovasi yang sesuai dengan Masterplan Smartsity	Seluruh PD
				Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Dokumen Laporan	Dokumen	0	0	0	1	1	735.982.000	Dinas Kominfo	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Seluruh PD

				Daerah											
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	0	0	0	1	1	227.400.000	Dinas Kominfo	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	Seluruh PD
S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan															
6.	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan unit kerja mendapat predikat Zona Integritas	3 OPD	Pelaksanaan survey PAK dan Persepsi Kualitas Pelayanan pada Perangkat Daerah yang dijukan Penilaian ZI WBK/WBBM	Nilai Survey PAK dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Dokumen	3	-	-	-	3	625.000	Inspketorat	Melaksanakan Survey Madiri IPAK dan IPKP	Disnakertrans, DPMPPTSP, Kapanewon Jetis
				Pendampingan penilaian mandiri zona integritas pada perangkat daerah yang akan diajukan ZI WBK/WBBM	Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan zona integritas	Dokumen	-	3	-	-	3	625.000	Inspketorat	Melaksanakan pendampingan KKE dan Bukti dukung OPD yang diusulkan penilaian ZI	Disnakertrans, DPMPPTSP, Kapanewon Jetis
				Melaksanakan Evaluasi Syarat Pengusulan ZI	umlah prangkat Daerah	Dokumen	-	3	-	-	3	-	Inspketorat	Melaksanakan evaluasi syarat pengusulan ZI yang dikirimkan ke KemenPAN RB	Disnakertrans, DPMPPTSP, Kapanewon Jetis
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,1	Melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi	Dokumen laporan penilaian Mandiri maturitas SPIP terintegrasi	Dokumen	-	-	-	1	1	-	Inspektorat	Penilaian mandiri sesuai dengan tusi masing-masing	Inspektorat, Bappeda BPKPAD OPD pendukung sasaran Pemda terpilih
				Melaksanakan penjaminan kualitas Maturitas SPIP terintegrasi	Dokumen laporan penjaminan kualitas maturitas SPIP terintegrasi	Dokumen	-	-	-	1	1	-	Inspektorat	-	Inspektorat
8.	Penguatan Pengelolaan	Tingkat Tindak Lanjut	100%	Penyusunan SK Tim Admin Lapor	Tersusunnya SK tim Lapor	Dokumen	1	-	-	-	1	-	Dinas Kominfo	Pengelolaan aduan masing-masing OPD	Dinas Kominfo

	Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat (LAPOR)		perangkat daerah	Perangkat Daerah										
				Monitoring pelaksanaan layanan pengaduan	Laporan Monitoring layanan pengaduan	Dokumen				1	1	2.000.000	Dinas Kominfo	Penyusunan data aduan	Seluruh PD
				Pembinaan pengelola pengaduan (Pejabat Penghubung OPD)	Forum Pengelolaan Pangaduan	Kegiatan	-	-	-	1	1	3.000.0000	Dinas Kominfo	Menindaklanjuti Aduan	Seluruh PD
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Survei Penilaian Integritas	80	Melaksanakan Sosialisasi dan Kampanye Survey Penilaian Integritas pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Bantu	Jumlah perangkat daerah yang ikut sosialisasi dan Kampanye SPI KPK 2023	Jumlah OPD	-	-	44	-	44	3.700.000	Inspketorat	Melaksanakan Sosialisasi SPI 2024	Seluruh PD kecuali RSUD PS Dan RS Saras Adyatma
				Penyusunan rencana aksi dan Tindak lanjut SPI Tahun 2023.	Dokumen rencana aksi tindak lanjut SPI	dokumen	-	-	1	-	1	1.275.000	Inspketorat	Melaksanakan rakor tindak lanjut temuan SPI 2023	Seluruh PD kecuali RSUD PS Dan RS Saras Adyatma
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPI Tahun 2024	Jumlah laporan monitoring SPI	Laporan	-	-	-	1	1	1.000.000	Inspketorat	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pemasangan KODE QR pda OPD	Seluruh PD
		Nilai Monitoring Center of Prefention (MCP) KPK	96	Melaksanakan Upaya-upaya pencegahan korupsi melalui 8 area pencegahan	8 Area pencegahan	Dokumen bukti dukung	-	-	8	-	8	2.000.000	inspektorat	Menyampaikan bukti dukung sesuai pedoman pencegahan Tahun berjalan	Inspektora Bappeda BKPAD BKPSDM DPUPKP DPMTSP DPTR Dinas Dukcapil Diskominfo ... Bagian LPBJ Bag Hukum

S.7															
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi															
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan (IKK)	50	Sosialisasi ke PD persiapan penilaian tahun 2025	Dokumentasi pelaksanaan kebijakan	Dokumen	-	-	1	-	1	4.750.000,00	Bagian Hukum	Bagian Hukum	Seluruh PD
				Seleksi produk hukum yang diajukan	Jumlah produk hukum	Dokumen				10	10	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum	Setda (Bagian Hukum)
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	65	Penyusunan SK Tim Kerja, Tim Asesor dan Tim Penilai	SK Bupati	Dokumen	1	-	-	-	1	185.375.000	Bagian Hukum	-	Setda (Bagian Hukum)
				Pengumpulan bahan IRH tiap variabel	Lapoaran	Dokumen	1	1	1	1	4	-	Bagian Hukum	-	Setda (Bagian
				Pengisian dokumen IRH	Laporan IRH	Dokumen			1		1	-	Bagian Hukum	-	Hukum)
				Penilaian IRH	Indeks IRH	Indeks	-	-	-	100	100	-	Bagian Hukum	-	Setda (Bagian Hukum)
S.8															
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral															
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas Pengelolaan Arsip	82	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan statis	Fasilitasi dan Pendampingan	kegiatan	1	1	2	1	5	100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	Melakukan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan statis	Seluruh PD
				Sosialisasi Pengelolaan Arsip	Sosialisasi Pengelolaan Arsip	kegiatan	3	-	2	-	5	10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	Melakukan sosialisasi regulasi pengelolaan arsip yang baru	Seluruh PD
				Pendampingan dan pelaksanaan penilaian internal pengelolaan arsip perangkat daerah	Hasil Penilaian internal dan eksternal	Perangkat Daerah	-	52	-	-	52	46.996.900	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	Melakukan penilaian dan pengawasan kearsipan internal	Seluruh PD
		Indeks Pengelolaan Arsip Digital	82	Digitalisasi Arsip Statis	Jumlah arsip yang di digitalkan	Arsip	119	125	135	145	524	2.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	-	Seluruh PD
				Melaksanakan Upload arsip digital ke dalam aplikasi SIKN	Jumlah Arsip digital yang diunggah	Arsip	96	97	97	95	385	1.080.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mengidentifikasi dan menyerahkan arsip statis ke Dinas Perpustakaan dan	Seluruh PD

				JIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)										Kearsipan selaku LKD	
				Memberikan Layanan dan Akses Informasi arsip kepada Masyarakat dan instansi yang membutuhkan	Jumlah pengunjung yang mengakses informasi arsip	orang	20	20	20	20	80	1.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Seluruh PD
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik/ Tingkat kematangan penyelenggaraa n statistik sektoral	2,49	Pelaksanaan perencanaan data meliputi identifikasi kebutuhan data dan penetapan daftar data	Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	Dokumen	1	-	-	-	1	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menetapkan daftar data	Seluruh PD
				Menyusun proses bisnis statistic	Proses bisnis statistik	dokumen	-	-	-	1	1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Menetapkan juknis proses bisnis statistik	Seluruh PD
				Pelaksanaan ketugasan walidata meliputi pemeriksaan dan penyebaran data statistik sektoral	Laporan Penyelenggara n Satu Data Indonesia	Dokumen	0	0	0	1	1	47.125.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memeriksa dan menyebarluaskan data pada Portal Data Bantul sesuai prinsip SDI	Seluruh PD
				Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik	Jumlah rekomendasi kegiatan statistik dari BPS	Rekomen dasi	-	-	0	50	50	43.212.500	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengkoordinir dan memeriksa pengajuan rekomendasi kegiatan statistik	Seluruh PD
				Penyusunan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	Metadata	-	-	-	190	190	48.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengkoordinir penyusunan metadata kegiatan statistik	Seluruh PD
				Pemeliharaan dan pengembangan	Jumlah portal data terpelihara	Aplikasi	2	2	2	2	8	48.000.000	Dinas Komunikasi dan	Pemeliharaan dan pengembangan Portal Data Bantul	Dinas Komunikasi dan

				Portal Data Bantul									Informatika		Informatika
				Pemanfaatan Big Data dari Marketplace	Penyajian hasil analisa big data	Dashboar d	-	-	1	1	1	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memfaatkan big data	Dinas Komunikasi dan Informatika
S.9															
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset															
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indek tata kelola pengadaan barang dan jasa	75	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada OPD	Laporan pendampingan	Dokumen	1	2	3		6	142.705.000	Setda (Bagian PBJ)	Penyusunan rencana umum pengadaan	Seluruh PD
				Verifikasi realisasi pengadaan barang dan jasa	Dokumen verifikasi	Dokumen	-	-	-	1	1	-	Setda (Bagian PBJ)	-	Setda (Bagian PBJ)
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Baik	Verifikasi RKA dan DPA SKPD melalui sistem	Dokumen RKA dan DPA terverifikasi	Dokumen	3	3	3	3	12	10.625.000	BPKPAD	Menindaklanjuti hasil verifikasi	Seluruh PD
				Rekonsiliasi aset	Update data aset	Laporan aset	1	1	1	1	4	203.865.600	BPKPAD	Menyusun laporan aset	Seluruh PD
				Rekonsiliasi Belanja dan Pendapatan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Laporan	1	-	-	-	1	253.895.000	BPKPAD	Menyusun LKPD	Seluruh PD
				Pemeliharaan basis data PBB P2	Laporan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Laporan	-	1	1	-	2	154.172.500	BPKPAD	Pemeliharaan data PBB P2 sampai dengan Peta bidang	2 kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Baik	Melakukan pemetaan dan inventarisasi data temuan/catatan dan rekomendasi BPK	Persentase Catatan/Temuan/ Rekomendasi BPK yang dipetakan dan diinventaris	Persen	-	-	-	63,5	63,5	22.142.000	Inspektorat	-	Inspektorat
				Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti	koordinasi tindaklanjut rekomendasi BPK	Kali	-	-	1	1	2	-	Inspektorat	-	Inspektorat

				rekomendasi BPK											
				Melakukan tindak lanjut rekomendasi BPK dan Monev	Data tindak lanjut rekomendasi BPK Hasil monitoring dan rencana tindak lanjut	Dokumen	-	-	-	1	1	-	Inspektorat	-	Inspektorat
SS.2															
Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional															
	S.1 Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional														
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transpormasi Jabatan fungsional	100	Prosentase penataan ASN dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan formasi kebutuhan masing-masing Jabatan Fungsional	ASN dalam Jabatan Fungsional yang ditata	persen	-	-	-	100	100	-	BKPSDM	-	BKPSDM
	S.2 Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien														
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Baik	Pelaksanaan tes potensi dan kompetensi PNS dengan sistem online menggunakan Aplikasi Sobat Karir	Jumlah Pengukuran Potensi dan Kompetensi ASN	ASN	32	98 6	930	450	2.398	192.700.000	BKPSDM	-	BKPSDM
				Perekapan hasil dari tes potensi dan kompetensi PNS	Rekap hasil dari tes potensi dan kompetensi ASN	Laporan	3	3	3	3	12	-	BKPSDM	-	BKPSDM
				Penyusunan/ Pengelompokan PNS dalam talenta	Jumlah PNS yang masuk dalam kolam talenta	PNS	32	98 6	930	450	2.000	-	BKPSDM	-	BKPSDM
	S.3 Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN														
18	Penguatan Sistem Pembelajaran	Tingkat implemetasi Kebijakan	Baik	Optimalisasi pembelajaran diklat	Peserta diklat menggunakan LMS kab.	ASN	495	24 0	112 9	60	1.924	-	BKPSDM	-	BKSPDM

	Terintegrasi	Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN		melalui Learning Manajemen System (LMS) Kab. Bantul	Bantul										
		Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	100%	Penyusunan rencana kebutuhan ASN	dokumen rencana kebutuhan	dokumen	-	1	-	-	1	-	BKPSDM	-	BKPSDM
				Fasilitasi pelaksanaan rekrutment ASN sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan Pelaksanaan Rekrutmen ASN sesuai dengan aturan	Laporan	-	1	1	-	2	646.046.520	Inspektorat	-	BKPSDM
	S. 5 Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN														
19	Tingkat implementasi digitalisasi manajemen ASN	Prosentase Layanan Pegawai yang di digitalisasikan	95%	Mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian (kinerja, disiplin, diklat, pengembangan karier dan sim kepegawaian lainnya)	SIM yang diintegrasikan	Aplikasi	-	-	-	1	1	50.000.000	BKPSDM	-	Seluruh PD
	S.6 Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja														
20	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	Evaluasi Pohon Kinerja dan Casecading Kinerja	Dokumen Evaluasi Pohon Kinerja dan Case Cading Kinerja	Dokumen	-	-	-	1	1	28.375.000	BKPSDM	-	BKPSDM
				Pendampingan dan coaching clinic pengelolaan kinerja dalam aplikasi Ekinerja	Persentase jumlah ASN dalam penyusunan pengelolaan kinerja	Persen	100	100	100	100	100	-	BKPSDM	-	BKPSDM
				Pengelolaan hasil kinerja pegawai dari buku kerja harian dalam aplikasi SAPA ASN	Jumlah rekapan poin pekerjaan dalam buku kerja pegawai	Dokumen	3	3	3	3	12	-	BKPSDM	-	BKPSDM
				Terlaksananya evaluasi kinerja	Dokumen Rapot kinerja	Dokumen	45	45	45	45	45	5.000.000	Bappeda	Menyampaikan nilai dan rekomendasi	Tim evaluasi

				PD dan pemberian reward	Perangkat daerah										Kinerja PD
21	Penguatan Sistem Merit	Indeks merit sistem	275 Indeks	Pengelolaan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa adanya deskriminasi	Capaian indeks sistem merit	Indeks	-	-	-	275	275	-	BKPSDM	-	BKPSDM
22.	Pelaksanaan Core Values ASN	Tingkat implementasi budaya kerja	Baik	Identifikasi Rencana reviu Peraturan Bupati tentang kode etik dan kode perilaku ASN	Draft Peraturan Bupati tentang kode etik dan kode perilaku ASN	Dokumen	-	-	-	1	1	-	BKPSDM	-	BKPSDM
				Mendampingi dan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Budaya Kerja Pemerintahan	Dokumen Rencana Aksi Budaya Kerja Pemerintahan	Dokumen	1	-	-	-	1	5.000.000	Bagian Organisasi	Menyusun rencana aksi Budaya Kerja Pemerintahan	Seluruh PD
				Internalisasi Budaya Kerja Pemerintahan kepada agen perubahan	Kegiatan Internalisasi	Kegiatan	1	-	1	1	3	5.000.000	Bagian Organisasi	Melakukan internalisasi dimasing-masing OPD	Seluruh PD
				Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja Pemerintahan	Dokumen Monitoring dan evaluasi	Dokumen	-	-	-	1	1	5.000.000	Bagian Organisasi	Melakuakn survey internal	Seluruh PD
23.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indek Kualitas Pelayanan Publik	4,6	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP)	Rata rata Indek Kualitas Pelayanan Publik PD	Nilai	-	85	-	-	85	30.647.000	Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat KAK - Membuat Instrumen evaluasi - Sosialisasi - Pelaksanaan evaluasi - membuat laporan evaluasi - melakukan evaluasi kegiatan 	Seluruh PD, dan Puskesmas
				Pelaksanaan Survei Kepuasan	Prosentase Jumlah PD	Persen	-	-	90	-	90	40.000.000	Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat KAK - Membuat Edaran 	Seluruh PD, dan

				Masyarakat	melaporkan Laporan SKM									<ul style="list-style-type: none">- Menerima laporan SKM PD- membuat laporan evaluasi SKM melakukan evaluasi kegiatan	Puskesmas
		Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	90	Pendampingan penyusunan dokumen Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Dokumen kepatuhan Pelayanan Publik	Dokumen	-	-	-	1	1	69.040.500	Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none">- Membuat KAK- Melakukan rakor dg PD lokus evaluasi- Mendampingi PD lokus- membuat laporan evaluasi- melakukan evaluasi kegiatan	Seluruh PD, dan Puskesmas

II. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. 5 tema Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Adapun Digitalisasi administrasi pemerintahan akan di fokuskan dalam percepatan capaian penanganan stunting.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Adapun Prioritas dan aktual presiden diarahkan untuk :

- a. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
- b. Pengendalian Inflasi

Tabel 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Jumlah Anggaran	Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	TOTAL				
Rendahnya kualitas dan keterpaduan database (Kemiskinan)	Tersedia nya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, terpadu dan terupdate	Satu data terpadu By Name By Address By NIK	85%	Rekonsiliasi data penduduk miskin dan pemutakhiran data sasaran	Data penduduk miskin yang telah dimutakhirkan	%	-	-	30	40	70	404.114.000	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melakukan profiling data kemiskinan ekstrem	Penduduk miskin ekstrem yang di-profiling	%	-	-	50	50	100	2.125.000	Tidak terkait langsung	Bappeda	Dina social, PD terkait dan Mitra
Perencanaan dan penganggaran pengantasan kemiskinan masih belum terpadu lintas sektor dan instansi	Tersusun nya perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan	7 Dokumen	Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024	Rencana Aksi Tahunan	dokumen	1	-	-	-	1	7.600.000	Tidak terkait langsung	Bappeda	Bappeda dan PD
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	dokumen	-	2	-	-1	3	244.960.232	Tidak terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaa n Air Limbah	dokumen	-	-	-	4	4	231.900.000	Tidak terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra

					Domestik (SPALD) yang disusun										
Profesionalitas SDM pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan	Terwujudnya profesionalisme SDM pengelola dan pelaksana program pengentasan kemiskinan	Jumlah SDM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan /bimtek/diklat/dll	327 orang/lembaga	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	-	60	90	40	190	254.846.000	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	30	30	-	60	292.294.630	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Lembaga Masyarakat dan Mitra
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya	Keluarga	-	-	48	-	48	93.300.000	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	17	17	17	17	17	251.165.340	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan	Sertifikat	-	-	-	12	12	10.978.850	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra

				(LK3)	Lembaga Konsultasi Kesejahter aan Keluarga (LK3)										
Pelaksanaan program dan kegiatan masih banyak dikeluhkan masyarakat	Terlaksananya pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase aduan masyarakat yang terlayani	100%	Melaksanakan pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kalurahan	Pelayanan Puskesmas di Kalurahan	%	100	100	100	100	100	APBD kalurahan	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melaksanakan Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Pelayanan SLRT di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	3.187.500	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Pengurangan beban pengeluaran warga miskin	Jumlah program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang diberikan	25 Program	Melaksanakan Program Keluarga Harapan	Pelaksanaan Program Bantuan Sosial	bulan	3	3	3	3	12	APBN	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan Program Bantuan Sosial	Bulan	3	3	3	3	12	APBN	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melaksanakan Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan pendampingan Program Bantuan Sosial	Bulan	3	3	3	3	12	95.850.000	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Melaksanakan Pendampingan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)	Pelaksanaan Program Bantuan Sosial	Bulan	3	3	3	3	12	APBD Provinsi DIY	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Dinas Sosial DIY dan Mitra
				Melaksanakan Program Bantuan Langsung	Pelaksanaan Program Bantuan	%	-	-	-	100	100	949.816.200	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra

				Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH-CHT)	Sosial										
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	1.112	1.112	1.112	1.112	8.412.003.636	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Kalurahan dan Mitra	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan Reunifikasi Keluarga	bulan	3	3	3	3	12	13.500.000	Terkait langsung	Dinas sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Orang	-	60	-	7	67	167.658.000	Tidak Terkait	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mltra
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	Orang	23	14	40	40	77	30.392.500	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Fasilitasi Bantuan	Jumlah Keluarga	Keluarga	-	-	-	2.21	2.212	1.603.737.540	terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra

				Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				2						
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat PBI-APBD	Dokumen	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	24.774.651.300	Terkait langsung	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Jamkesda dan pendamping TSKS
				Melaksanakan verifikasi dan validasi kepesertaan jamkesda	Jumlah kepesertaan jamkesda	jiwa	48.440				48.404	-	Terkait langsung	Dinas social	Dinas social
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	-	-	-	5	5	41.200.000	Terkait langsung	DPUPKP	DPU PKP dan Mitra
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air	SR	-	-	501	-	501	1.313.250.000	Terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra

					Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	-	-	-	50	50	1.263.650.000	Terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	-	-	-	200	200	2.532.000.000	Terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukima n Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	M³/Hari	-	-	-	51	51	526.300.000	Terkait langsung	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
				Pembanguna n Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang Terbangun	Unit Rumah	-	-	-	2	2	200.637.500	Terkait langsung	DPUPKP	DPU PKP dan Mitra

				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terehabilitasi	Unit Rumah	-	-	-	25	25	510.387.500	Terkait langsung	DPUPKP	DPU PKP dan Mitra
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	4	4	4	4	12	2.670.761.782	Terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	-	-	-	2	2	3.162.554.360	Terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	-	56	-	-	56	2.285.000.000	Terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	-	48	-	-	48	1.340.568.500	Terkait langsung	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	-	74	-	-	74	1.480.000.000	Terkait langsung	DPU PKP	DPU PKP dan Mitra

				untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki										
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	77.024	77.024	77.024	77.024	77.024	84.473.287.964	Terkait langsung	Disdikpora	Disdikporan dan Mitra
				Bantuan Pangan, Sosial, Santunan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar	Jumlah Perusahaan yang memberikan CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan	Perusahaan	-	-	6	6	12	Dana CSR	Terkait langsung	Bappeda	Bappeda dan Mitra
Masih rendahnya kemampuan dan akses berusaha warga miskin	Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan	31 Kegiatan	Melaksanakan pendampingan program KUBE Lestari budaya	Pelaksanaan pendampingan program KUBE Lestari Budaya	kegiatan	-	-	1	-	1	APBD Provinsi DIY	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra

	kat	usaha													
				Melaksanakan pendampingan program Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)	Pelaksanaan pendampingan program PENA	bulan	3	3	3	3	12	APBN	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	orang	-	50	-	-	50	194.300.270	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	40	80	50	50	220	246.238.400	Terkait langsung	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mitra
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	-	-	-	40	40	18.410.000	terkait langsung	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Mitra
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudaha	Kelompok	-	20	4	-	24	862.115.680	Terkait langsung	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Mitra

				Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	nan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Paket	-	-	-	27	27	515.280.500	Terkait langsung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Mitra
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	-	-	-	120	120	575.149.332	Terkait langsung	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Mitra
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan	orang	-	-	-	495	495	868.126.016	Terkait langsung	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Mitra

					Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata											
					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	perusahaan	-	4	4	2	10	79.000.000	Tidak terkait langsung	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	1	2	2	-	5	523.000.000	Tidak Terkait langsung	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	-	3	4	-	7	257.000.000	Terkait langsung	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
					Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	-	-	-	200	200	142.690.000	Terkait langsung	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
					Penyelenggaraan Unit Layanan	Jumlah Tenaga Kerja	orang	-	-	40	-	40	100.000.000	Terkait langsung	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra

				Disabilitas Ketenagakerjaan	Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD									
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	-	800	800	-	1600	269.075.000	Terkait langsung	Disnakertrans dan Mitra
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	-	13.386	-	-	13.386	51.106.000	Terkait langsung	Disnakertrans dan Mitra
				Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	-	-	500	-	500	56.375.000	Terkait langsung	Disnakertrans dan Mitra
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	orang	-	-	40	-	40	46.425.000	Terkait langsung	Disnakertrans dan Mitra
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala keluarga	-	-	-	5	5	370.000.000	Terkait langsung	Disnakertrans dan Mitra

				ota											
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi i pada Tahun n	orang	32	96	312	-	440	1.717.434.100	Terkait langsung	UPTD BLK	UPTD BLK dan Mitra
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit usaha	-	110	20	-	130	196.765.250	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	-	-	20	-	20	22.347.500	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Pelatihan Digital Marketing	orang	-	-	20	-	20	14.346.750	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
					Pelatihan Pembuatan Produk dan Packaging	orang	-	-	20	-	20	24.446.150	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
					Pelatihan Pengenaln Kewirausa	Orang	-	-	20	-	20	9.826.750	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra

					haan										
				Pengembang an Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitas	Unit usaha	50	85	40	-	175	509.173.840	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
				Penumbuhan dan Pengembang an Kewirausaha an	Jumlah yang Difasilitas	orang	40	13 0	80	-	250	116.925.000	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
				Pengembang an Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembang kan	unit	-	-	-	50	50	345.000.000	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
				Pengembang an Kewirausaha an Desa	Pelatihan Inovasi, Diversifikas i Produk dan Packaging IKM Jamu/Minu man Herbal	orang	-	-	-	15 0	150	50.000.000	Terkait langsung	DKUKMPP	DKUKMPP dan Kalurahan
				Pembinaan dan Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyaraka t yang dibina dan diberdayak an dalam Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM)	Orang	600	-	-	-	600	106.400.000	Terkait langsung	DPU PKP	Dinas DPU PKP dan Mitra
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaa n Air Minum	Lembaga	-	55	-	-	55	33.585.000	Terkait langsung	DPU PKP	Dinas DPU PKP dan Mitra

				(SPAM)	(SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya										
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	-	-	-	150	150	27.595.000	Terkait langsung	DPUPKP	Dinas DPU PKP dan Mitra
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa	-	2	2	-	4	34.675.000	Terkait langsung	DPUPKP	Dinas DPU PKP dan Kalurahan

Tabel 3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Jumlah Anggaran (Rp.)	Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	TOTAL				
Tingkat Pertumbuhan ekonomi daerah masih dibawah Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (INVESTASI)	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai realisasi investasi (PMDN+ PMA) sampai dengan tahun n	2.290.349.862.696,81	Sosialisasi Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan	-	1	-	-	1	17.091.750	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten	Laporan Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Laporan	-	1	-	-	1	11.850.000	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Disnakertrans,DKUK MP
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	dokumen	-	1	-	-	1	47.562.500	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dispertaru, DLH

					n										
				Review Penyusunan Peta Potensi	Jumlah dokumen hasil Review Penyusuna n Peta Potensi	dokumen	-	1	-	-	1	12.300.000	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dispertaru, DLH, DPUPKP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan kelautan,DKUKMP
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanama n Modal Kabupaten	Dokumen	-	1	1	-	2	119.527.616	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP,DKUKMP
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten	Jumlah Media /aplikasi Promosi	Media /aplikasi Promosi	-	1	-	-	1	-	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dispertaru, DLH, DPUPKP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan kelautan,Diskominfo, DKUKMP
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatk an Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Pelaku Usaha	425	42 5	42 5	42 5	425	147.604.780	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dispertaru, DLH, DPUPKP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan kelautan,DKUKMP, Disnakertrans

					i secara Elektronik										
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantaua n, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan usaha	500	500	500	500	2000	93.319.368	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan,
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesai an Permasala han dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasi kan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	1	3	3	1	8	185.292.500	Terkait	DPM{TSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dispertaru, DLH, DPUPKP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan kelautan,DKUKMP, Disnakertrans
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	Pelaku Usaha	50	50	88	50	238	550.740.750	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dispertaru, DLH, DPUPKP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan

					Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko										kelautan,DKUKMP, Disnakertrans
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	7	7	7	7	28	130.415.116	Terkait	DPMPTSP	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dispertaru, DLH, DPUPKP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan kelautan,DKUKMP, Disnakertrans

Tabel 4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang di fokuskan dalam percepatan capaian penanganan stunting.

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Jumlah Anggaran	Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	TOTAL				
Tingkat kunjungan ke posyandu yang masih rendah (STUNTING)	Meningkatnya kualitas pelayanan posyandu	Persentase balita di timbang dan diukur	82%	Pemantauan tumbuh kembang balita dengan berkolaborasi dengan kader kesehatan posyandu balita diwilayah	Balita ditimbang dan diukur di posyandu	Persen/triwulan	82	82	82	82	82	40.500.000	Terkait	Dinkes	Dinkes, Kader Kesehatan Desa
				Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kebalita malnutrisi atau KEK	Balita malnutrisi mendapatkan makanan tambahan	Persen/triwulan	100	100	100	100	100	144.380.100	Terkait	Dinkes	Dinkes, Kader Kesehatan Desa, Tim pendamping keluarga (TPK)
Minimnya data balita stunting	updating data stunting	Persentase updating data balita stunting	100%	Menyampaikan informasi terkait dengan data balita stunting perkalurahan setiap penimbangan	Data balita stunting per kalurahan	Persen/triwulan	100	100	100	100	100	12.700.000	Terkait	Dinkes	Dinkes, Kader Kesehatan Desa, Tim pendamping keluarga (TPK)
Masih kurangnya ibu hamil yang mendapatkan suplemen zat besi	Meningkatnya ibu hamil mendapatkan suplemen zat besi	Persentase ibu hamil mendapatkan Tablet tambah darah	100%	Memastikan pada ibu hamil agar melakukan Antenatal care di faskes pada tiap trimester dan memastikan	Tersedianya data ibu hamil mendapatkan TTD	Persen/triwulan	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	172.700.000	Terkait	Dinkes	Dinkes, DP3AP2KB, Kader Kesehatan Desa, Tim pendamping keluarga (TPK)

				pemberian TTD											
Data cakupan catin (calon pengantin) pada ELSIMIL belum optimal	Meningkatnya Calon pengantin yang mengisi data di aplikasi ELSIMIL	Persentase cakupan data catin yang mengakses aplikasi ELSIMIL	100%	Optimalisasikan catin untuk mengakses dan mengisi formulir aplikasi di ELSIMIL baik secara mandiri/ didampingi oleh TPK, agar kondisi kesehatan catin dan kesiapan dalam kehamilan terpantau dengan baik.	Jumlah Catin yang mengakses dan mengisi formulir di ELSIMIL	Persen	100	100	100	100	100	-	Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, Kemenag, Tim Pendamping Keluarga (TPK)
				Sinkronisasi data catin dengan Kemenag, Dinkes	Updating data Calon pengantin	Persen	25	25	25	25	100	-	Tidak terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, Dinkes
Capaian pendampingan pada seluruh sasaran belum maksimal	Meningkatnya pendampingan Keluarga berisiko stunting	Persentase Keluarga berisiko stunting terdampingi	100%	Optimalisasi peran tim percepatan penurunan stunting dan monitoring pendampingan TPK di wilayah Kapanewon maupun Kalurahan	Keluarga berisiko stunting mendapatkan Pendampingan	Persen	25	25	25	25	100	1.339.800.000	Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPK
Tercapainya pemantauan data Keluarga Berisiko Stunting	Pemantauan Data Keluarga Berisiko Stunting	Persentase Data Keluarga Berisiko Stunting	100%	Optimalisasi Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting pada setiap sasaran	Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Persen	25	25	25	25	100	1.218.000.000	Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPK

Belum terlaksana Pengadaan BKB Kit Stunting	Pengadaan BKB Kit Stunting	Persentase Pengadaan Barang	100%	Optimalisasi Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB Kit Stunting)	BKB Kit Stunting	Persen	25	25	25	25	100	300.000.000	Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, PKB/PLKB, TPK
Sudah terlaksananya pelaksanaan mini lokakarya Kapanewon secara rutin tiap bulan	Pelaksanaan mini lokakarya Kapanewon	Persentase pelaksanaan mini lokakarya Kapanewon	100 %	Memastikan disetiap kapanewon melakukan mini lokakarya ditingkat Kapanewon berjalan sesuai dengan petunjuk teknis 10 kali dalam 1 tahun	Mini lokakarya tingkat kapanewon	Persen	25	25	25	25	100	255.000.000	tidak terkait	DP3APPKB,	DP3APPKB, PKB/PLKB, TPK
Belum optimalnya dalam pelaksanaan DASHAT	Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) / Dapur Gizi Keluarga Berbasis Bahan Pangan Lokal di Kalurahan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) yg memiliki Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kalurahan	100%	Pembentukan dan optimalisasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) / Dapur Gizi Keluarga Berbasis Bahan Pangan Lokal di Kalurahan	Kalurahan yang memiliki Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Persen	25	25	25	25	100	-	Tidak Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPPS, Tim Pendamping Keluarga (TPK), PMDKal
	Pemberian makanan tamba	Prosentase sasaran stunting	100%	melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan	Keluarga berisiko stunting mendapatk	Persen	25	25	25	25	100	-	Terkait	DPMKAL	DPMKAL, Dinkes, Dinsos, DP3APPKB

	n kepada sasaran stunting	yang mendapatkan bantuan pemberian makanan tambahan		dalam pemebrian makanana tambahan agar dapat sesuai dengan standar intervensi spesifik	an PMT yang sesuai										
Pelaksanaan AKS (Audit Kasus Stunting) belum sesuai jadwal	Meningkatnya pelaksanaan AKS	Presentase Audit Kasus Stunting di setiap lokus AKS	100%	Melakukan Audit Kasus Stunting dengan lokus AKS yang sudah di tentukan di tahun 2024	Lokus AKS telah dilakukan Audit	dokumen	-	1	-	1	2	80.000.000	Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPPS Kab, Kap, Kal, PKB/PLKB Tim Pendamping Keluarga (TPK)
Koordinasi TPPS ditingkat Kab belum rutin dilaksanakan	Meningkatnya koordinasi TPPS di tingkat Kab/ Kota	Presentase kegiatan koordinasi	100%	Mengoptimalisasi seluruh kegiatan rapat koordinasi di tingkat Kab/ Kota terkait Percepatan Penurunan Stunting	Terlaksananya koordinasi TPPS di tingkat Kab/ Kota	Persen	25	25	25	25	100	200.000.000	Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPPS Kab, Kap, Kal, PKB/PLKB TPK / Tim Pendamping Keluarga
Masih dalam proses pelaksanaan	Data Keluarga yang Beresiko stunting terupdate	Prosentase Kelompok Sasaran Keluarga yang Beresiko stunting terupdate	100%	Update Pemetaan Kelompok Sasaran Keluarga yang Beresiko stunting yang Terupdate dengan melakukan VERVAL	Pemetaan Kelompok Sasaran	Persentase dari sasaran Keluarga	-	100	-	-	100		Terkait	DP3APPKB	DP3APPKB, TPPS, Tim Pendamping Keluarga (TPK)
Belum semua pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya pelayanan publik digital	Tingkat Transformasi pelayanan publik digital	84%	Pengelolaan Pusat Data	Laporan Pengelolaan Pusat Data	Unit	1	1	1	1	4	5.034.700.000	Tidak terkait	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Pengembangan portal	Aplikasi	Aplikasi	0	0	1	0	1	575.965.203	Tidak terkait	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo

				Layanan Publik Terintergrasi											
				Menghubungkan Layanan Publik ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan SPLP	Layanan	0	1	1	1	3	242.380.000	Tidak terkait	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
				Fasilitasi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi di Semua Perangkat Daerah	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	Kegiatan	2	2	2	2	8	-	Tidak terkait	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo

Tabel 5. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Jumlah Anggaran	Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	TOTAL				
Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) perlu ditingkatkan	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi PDN	Realisasi PDN sebesar 70%	Pemberian Reward and Punishment kepada perangkat daerah atas capaian Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang / jasa pemerintah	Tersusunnya Parameter Penilaian dan bentuk Reward and Punishment	Dokumen	-	1	-	-	1	-	Tidak Terkait	Dinas KUKMPP Kab. Bantul	Tim P3DN Kab. Bantul / BPBJ / DPKUKMPP
				Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa dari PDN	Tersusunnya kebijakan pengadaan Barang/Jasa (Percepatan inputan SIRUP dan Tagging belanja PDN)	Dokumen	1	-	-	-	1	-	Tidak Terkait	PBJ Kab. Bantul	Tim P3DN Kab. Bantul/ PBJ / BKAD
				Fasilitasi/ Pendampingan / Sosialisasi pendaftaran, penayangan, dan penambahan produk dalam E-Katalog	Terlaksananya pendampingan pendaftaran, penayangan, dan penambahan produk dalam E-Katalog	Kegiatan	1	1	1	1	4	-	Terkait Langsung	Dinas KUKMPP Kab. Bantul	Tim P3DN Kab. Bantul/ PBJ / DKUKMPP
				Pemberdayaa	Terlaksana	Kegiatan	2	3	2	-	7	457.755.000	Terkait Langsung	Dinas	Dinas KUKMPP Kab.

				n dan Pembinaan Daya Saing kepada UMKM	nya peningkata n daya saing UMKM							KUKMPP Kab. Bantul	Bantul		
				Sosialisasi / Fasilitasi Sertifikasi TKDN Bagi Seluruh Produsen Barang/ Jasa di Kab. Bantul	Bertambah nya produsen Barang/Jas a yang bersertifika t TKDN	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	Terkait Langsung	Dinas KUKMPP Kab. Bantul	Dinas KUKMPP Kab. Bantul
				Pelaksanaan Bisnis Matching PDN	Terlaksana nya promosi/ percepatan dan bisnis matching PDN	Kegiatan	1	-	-	-	1	10.300.000	Terkait Langsung	Dinas KUKMPP Kab. Bantul	Dinas KUKMPP Kab. Bantul
				Koordinasi dan Sosialisasi dengan OPD tata cara pengisian realisasi P3DN	Terlaksana nya kegiatan koordinasi sosialisasi tatacara pelaporan realisasi P3DN	Kegiatan	-	1	-	1	2	6.374.000	Tidak Terkait Langsung	Dinas KUKMPP Kab. Bantul	Dinas KUKMPP Kab. Bantul
				Menyelengga rakan Konsultasi Bagi PD/Unit Kerja untuk Pelaporan Realisasi P3DN	Terlaksana nya konsultasi OPD/Unit kerja untuk pelaporan realisasi P3DN	Bulan	3	3	3	3	12	-	Tidak Terkait Langsung	Dinas KUKMPP Kab. Bantul	Dinas KUKMPP Kab. Bantul
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksana nya monitoring, evaluasi dan pelaporan PDN	Dokumen	1	1	1	1	4	-	Tidak Terkait Langsung	Dinas KUKMPP Kab. Bantul	Tim P3DN Kab. Bantul
				Pengawasan intern terhadap Realisasi	Terlaksana nya pengawasa n intern	Laporan	1	1	1	1	4	-	Tidak Terkait	Inspektorat Daerah Kab. Bantul	Inspektorat Daerah Kab. Bantul

				Belanja Produk Dalam Negeri	PDN										
SDM Tata Kelola yang Belum Kompeten	Meningkatnya Pengelola PBJ yang Kompeten	Jumlah SDM Pengelola PBJ yang Tersertifikasi	Meningkat	Melakukan Pelatihan kepada SDM UKPBJ	SDM UKPBJ yang Dilatih	Orang	174	30	60		264	-	Tidak Terkait	BKPSDM	BKPSDM
				Melakukan Sertifikasi kepada SDM UKPBJ yang Sudah Diberikan Pelatihan	Jumlah SDM UKPBJ yang Lulus Sertifikasi	Orang	174	-	80	60	314	-	Tidak Terkait	BKPSDM	BKPSDM
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang Belum Matang	Meningkatnya Kemampuan UKPBJ	Tingkat Kemampuan UKPBJ	level kemampuan proaktif	Melakukan peningkatan pada Domain Proses	Peningkatan Domain Proses	Kegiatan	-	-	-	1	1	-	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada Domain Kelembagaan	Peningkatan Domain Kelembagaan	Kegiatan	-	-	-	1	1	-	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada Domain SDM	Peningkatan Domain SDM	Kegiatan	-	-	-	1	1	-	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan BKD
				Melakukan peningkatan pada Domain Sistem Informasi	Peningkatan Domain SI	Kegiatan	-	-	-	1	1	-	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ
Sistem Teknologi yang Belum Optimal dalam Menunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Melalui Sistem	Indikator pemanfaatan sistem pengadaan Skor 25	Melakukan peningkatan pada SIRUP	Peningkatan pemanfaatan SIRUP	Kegiatan	-	-	-	1	1	63.467.500	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada e-Tendering	Peningkatan pemanfaatan e-Tendering	Kegiatan	-		1		1	63.467.500	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada e-Purchasing	Peningkatan pemanfaatan e-Purchasing	Kegiatan	-	1	-	-	1	13.091.700	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan Seluruh OPD
				Melakukan peningkatan pada Non e-	Peningkatan pada pemanfaatan	Kegiatan	-	1	-	-	1	14.000.000	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan Seluruh OPD

				Tendering dan Non e-Purchasing	an Non e-Tendering dan Non e-Purchasing										
				Melakukan peningkatan pada e-Kontrak	Peningkatan pada e-Kontrak	Kegiatan	-	1	-	-	1	14.000.000	Tidak Terkait	Bagian PBJ	Bagian PBJ dan Seluruh OPD

Tabel 6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi Koordinator	Output		Target Triwulan					Jumlah Anggaran	Jenis Kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat /stakeholder utama)	Koordinator	Pelaksana
					Indikator	Satuan	I	II	III	IV	TOTAL				
Kurang terkoordinasikan nya pelaksanaan pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya peran TPID	Tersusun nya perbub Roadmap TPID	1 dok	Membentuk TIM TPID	SK Bupati Tim TPID	Dokumen	1	-	-	-	1	1.062.500	Tidak terkait	Bag.PPSDA	Bag.PPSDA
				Mengkoordinasikan tim pengendali inflasi Daerah	Koordinasi Tim TPID dan Pemantauan Menjelang HBKN dengan TIM TPID DIY	rapat koordinasi	2	3	2	1	8	16.142.500	Tidak terkait	Bag.PPSDA	Bag.PPSDA
				Evaluasi pelaksanaan TPID	Informasi Perkembangan Harga Bapok dan Prognosis Neraca Pangan di web Bantulkab.go.id	Penyampaian Updating Harga Bapok dan Prognosis NP	1	1	1	1	8	4.250.000	Tidak terkait	Bag.PPSDA	Bag.PPSDA, Dinas Kominfo
Adanya ketimpangan stok bahan pokok antar daerah	Terjalinnya kerjasama antar daerah dalam pemerataan bahan pokok	stabilitas harga bapok	sesuai HET	Koordinasi Persiapan Kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi	Koordinasi Tim TPID Bantul Dengan TIM TPID DIY	rapat koordinasi	-	-	-	2	2	2.125.000	Tidak terkait	Bag.PPSDA	TPID
Perlunya menjaga stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan	Terwujudnya stabiliasi harga dan stok barang	Koefisien Variasi harga antar waktu bahan	7%	Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan	Terlaksananya pemantauan Ketersediaan dan	Laporan	-	1	-	1	2	7.012.500	Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP

barang penting	kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Bantul	pokok (13 jenis bahan pokok sesuai Perpres 59 Tahun 2020)		barang penting di pelaku usaha	harga bapakotng di pelaku usaha										
				Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar rakyat (5 pasar pantauan pasar Bantul, pasar Niten, pasar Imogiri, pasar Piyungan dan Pasar Pijenan)	Terlaksananya pemantauan harga dan stok bapak di pasar rakyat	Laporan	3	3	3	3	12	30.174.900	Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Operasi pasar regular barang kebutuhan pokok kepada pedagang di pasar rakyat	Terlaksananya Operasi Pasar	Kegiatan	4	2	2	2	10	12.687.500	Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Pasar Murah Bahan Pokok Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Terlaksananya pasar murah bahan pokok (di wilayah dengan Tingkat kemiskinan tinggi)	Kegiatan	-	1	1	1	3	30.022.500	Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Optimalisasi pengelolaan Gudang SRG (Pembinaan, Sosialisasi dan Monev)	Terlaksananya optimalisasi pengelolaan Gudang SRG	Kegiatan	-	1	-	-	1	9.247.500	Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP
				Penyebaran informasi perkembangan harga melalui	Penyampaian updating data harga bapak (29	Data	v	v	v	v	Setiap hari kerja	19.200.000	Terkait	DKUKMPP	DKUKMPP, Dinas Kominfo

				aplikasi Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAPAN) Kabupaten Bantul	jenis)										
Masih adanya jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik/rusak	Peningkatan kualitas jaringan irigasi	Rasio luas daerah kewenangan kabupaten bantul yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,73%	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	-	-	-	4,1	4,1	7.921.107.453	Tidak terkait	DPUPKP	DPUPKP
Ruas jalan di kabupaten bantul masih belum dalam konsisi mantap	Peningkatan kualitas jalan Kabupaten dalam kondisi mantab	Tingkat kemantapan jalan	78,84	Rehabilitasi jalan kabupaten	Panjang jalan yang direhabilitasi	KM	-	-	-	17,8	17,8	63.434.710.040	Tidak terkait	DPUPKP	DPUPKP
Kekurangan pasokan komoditas ikan	Terpenuh innya kebutuhan ikan dipasaran	Jumlah produksi perikanan	5 Ton/hari	Kegiatan Temu Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan	Laporan hasil kegiatan	kali	-	-	1	-	1	15.000.000	Tidak terkait	DKP	DKP
				Memberi bantuan sarana/prasarana budidaya ikan dan benih ikan	bantuan sarpras	kali	-	-	2	-	2	200.000.000	Tidak terkait	DKP	DKP
				Pelatihan Teknis Budidaya ikan	Pelatihan Teknis Budidaya ikan	kali	-	-	35	-	35	700.000.000	Terkait	DKP	DKP
Capaian produksi	Meningkatnya	Pertumbuhan	2,12%	Pelaksanaan inseminasi	jumlah kelahiran	Ekor	3000	-	-	-	3000	132.397.500	Terkait	DKPP	DKPP

tanaman pangan belum maksimal	produksi pertanian	produksi sektor pertanian		buatan ternak kambing/ domba	kambing/ domba hasil inseminasi										
				pelaksanaan inseminasi buatan ternak sapi	jumlah kelahiran sapi hasil inseminasi	Ekor	0	0	0	0	0	0	Terkait	DKPP	DKPP
				penyelenggaraan pelatihan budidaya ayam joper	Pelatihan yang diselengga rakan	Kali	-	16	-	-	16	400.000.000	Terkait	DKPP	DKPP
				Gerakan pengendalian Organisme pengganggu tanaman (OPT)	Luas lahan tertangani	Ha	-	50	50	50	150	50.000.000	Terkait	DKPP	DKPP
				Pelatihan budidaya tanaman pangan	Bimtek budidaya tanaman pangan	Kali	-	7	-	-	7	93.065.000	Terkait	DKPP	DKPP
Capaian sasaran diseminasi informasi publik di Kabupaten Bantul	Meningkatnya jumlah diseminasi informasi publik di Kabupaten Bantul	Peningkatan sasaran diseminasi informasi publik	72%	Diseminasi informasi publik	Jumlah pelaksanaan diseminasi informasi publik	Kali	18	16	16	16	66	63.000.000	Terkait	Diskominfo	Diskominfo
Capaian kunjung wisatawan belum maksimal	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	23,08%	Pelaksanaan Pentas Seni di destinasi wisata	Jumlah pelaksanaan pentas seni	Kali	2	4	5	1	12	225.000.000	Terkait	Dispar	Dispar

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH